



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: KPK Usut Pengadaan Material Kapal Angkut Tank
Tanggal	: Jumat, 20 Januari 2023
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 2

DUGAAN KORUPSI

KPK Usut Pengadaan Material Kapal Angkut Tank

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut tank TNI Angkatan Laut di Kementerian Pertahanan RI. Hasil penghitungan sementara dari KPK, kasus ini diduga merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dari hasil penyelidikan, KPK menemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, dilakukan penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank-1 dan Tank-2 TNI AL di Kemenhan tahun 2012-2018.

"KPK akan secara resmi mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkara, dan pasal yang disangkakan setelah progres pengumpulan alat bukti yang dilakukan tim penyidik, kami anggap cukup," kata Ali Fikri, Kamis (19/1/2023), di Jakarta.

Ia menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan masya-

rakat yang kemudian diverifikasi KPK. Setelah dilakukan pengayaan informasi, ada dugaan peristiwa pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK untuk mendalaminya. Ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK menutupi penyelidikan itu menjadi proses penyidikan.

Ali berharap pihak yang dipanggil sebagai saksi agar kooperatif dan memberikaneterangan apa adanya di hadapan tim penyidik. KPK mempersilakan masyarakat mengawasi serta mengawal penyidikan perkara ini. Dia memastikan semua proses penyidikan berjalan sesuai dengan mekanisme hukum.

Pada Kamis (19/1), penyidik KPK memanggil tujuh saksi dalam kasus ini. Mereka ialah Marketing Representative PT Bumiloka Tegar Perkasa 2007-2013 Denny S Dilaga, Kasubdiv Pemasaran I Pembangunan Kapal Baru PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB/Persero) periode tahun 2008-2013 Dwi Siswadi, Kasubdiv Proyek Divisi Logam di PT

DKB tahun 2008-2013 Erry Wibowo, serta Pimpro Kapal AT2 tahun 2016-2020 Eviral Ishar.

Selain itu, KPK juga memanggil pensiunan Divisi Engineering PT DKB HY Sugiyono, Kasubdiv Pemasaran Kapal Niaga/Business Development and Customer Service AVP tahun 2011-2016/Kasubdiv Project Monitoring, Evaluasi dan Customer Relationship tahun 2020 PT DKB Ina Riesiana Vidyanti, serta Manajer Keuangan Senior PT DKB Kawijan.

Kerugian negara

Ali mengatakan, saksi yang relevan dalam kasus ini akan dipanggil untuk melengkapi alat bukti. KPK telah memiliki dua alat bukti permulaan yang terus dilengkapi dan dikembangkan. Dalam kasus ini terdapat perbuatan melawan hukum sehingga ada dugaan kerugian negara.

"Jadi, bukan pasal suap, tetapi Pasal 2 dan Pasal 3 (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Tentu ini butuh waktu yang panjang. Ini harus dipahami juga karena

nanti pada gilirannya harus memenuhi seluruh unsur-unsurnya dapat merugikan negara dan lain-lain," kata Ali.

Ia menjelaskan, KPK masih perlu berkoordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian negara. Sementara ini, hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan KPK mencapai puluhan miliar rupiah.

Terkait dengan penyidikan perkara ini, Kemenhan masih akan mempelajarinya. "Kita akan pelajari lagi soal ini," kata Kepala Biro Humas Kemenhan Taufiq Shobri.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Dave Akbarshah Fikarno, mengatakan, kasus ini harus didalami dengan saksama. Kecurigaan KPK pasti sangat beralasan dan keterbukaan Kementerian Pertahanan ataupun TNI AL juga menjadi kunci terselesaikannya kasus ini. "Harus diurai mulai dari laporan akan potensi kerugian ada di mana? Seberapa besar yang dapat dijustifikasi, apakah ada pemakaian hingga menuarkan spek demi keuntungan semata," kata Dave. (PDS/EDN)